



Judul : Mafia beras premium oplosan rugikan rakyat, wajib tindak tegas
Tanggal : Minggu, 26 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Mafia Beras Premium Oplosan Rugikan Rakyat, Wajib Ditindak Tegas

ANGGOTA Komisi IV DPR Hindun Anisah mengungkapkan, praktik manipulasi kualitas beras premium masih marak. Praktik tersebut bukan sekadar pengoplosan biasa, tapi sudah masuk kategori kejahatan terorganisir.

Kata Hindun, masyarakat telah dibohongi. Mereka membayar mahal untuk beras yang kualitasnya tidak sesuai. "Ini sangat merugikan dan tidak bisa ditoleransi," tegas Hindun, dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Hindun mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) bertindak lebih tegas terhadap para pelaku yang disebut sebagai mafia beras. Praktik ini berpotensi merusak stabilitas harga pangan, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap distribusi bahan pokok. "Kami meminta agar penanganan kasus ini tidak berhenti pada pengungkapan semata," harapnya.

Untuk itu, ia mendorong adanya kerja sama antara Kementan dengan aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan pelaku sampai ke akar-akarnya. "Harus ada langkah konkret dan tegas," tegas politisi PKB ini.

Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi dan kualitas beras harus diperketat agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Karena perlindungan terhadap konsumen harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional.

Diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membongkar praktik

permainan beras premium di tingkat distribusi. Beras dengan kualitas rendah justru dijual dengan harga tinggi layaknya beras premium.

Temuan ini berasal dari hasil uji laboratorium terhadap beras yang beredar di pasar. "Praktik ini bukan sekadar pengoplosan, melainkan bentuk kecurangan serius," ujar Amran, saat meninjau beras di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Amran mengungkap, standar beras premium seharusnya memiliki kadar beras patah (*broken rice*) maksimal 14 persen. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan angka yang jauh melampaui batas tersebut.

"Yang kita tangkap itu 34 persen-59 persen (patahannya). Artinya harga Rp 12 ribu dijual Rp 17 ribu (per kg)," jelas Amran dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Amran melanjutkan, selisih harga sekitar Rp 5 ribu per kg itu, jika dikalikan dengan volume konsumsi 2 juta ton, berpotensi menimbulkan kerugian konsumen hingga Rp 10 triliun. Karena itu, praktik ini menjadi bagian dari rantai mafia pangan yang kini tengah ditindak bersama Satgas Pangan Polri. "Sejumlah pelaku telah ditangkap dan diproses hukum sebagai bagian dari upaya memberantas mafia pangan," kata dia.

Amran mengaku tak gentar memberantas praktik tersebut meski harus menindak segelintir orang. Hal itu perlu dilakukan karena merugikan ratusan juta rakyat Indonesia. ■ TIF